

Ciliwung Meluap, 27 RT di Jakarta Terendam Banjir

JAKARTA (IM) - Puluh wilayah rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta terendam banjir, Selasa pagi (7/6).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Insaf mengatakan banjir terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Data ini terakhir diperbarui pukul 09.00 WIB.

"Informasi genangan dari sebelumnya ada 27 RT atau 0,089 persen dari 30.470 RT yang ada di DKI Jakarta, dengan ketinggian lebih dari 40 cm," kata Insaf kepada wartawan, Selasa (7/6).

Di Jakarta Selatan terdapat delapan RT yang terendam banjir. Yakni, empat RT

di Kelurahan Pejaten Timur dengan ketinggian banjir mencapai 90 cm dan empat RT di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 70 cm.

Sementara itu, terdapat 19 RT yang terendam banjir di Jakarta Timur. Di antaranya, enam RT di Kelurahan Cawang dengan ketinggian 50 hingga 170 cm.

Kemudian, satu RT di Kelurahan Cililitan dengan ketinggian 40 hingga 190 cm, 10 RT di Kampung Melayu dengan ketinggian 50 hingga 120 cm, dan terakhir dua RT di Kelurahan Bidara Cina dengan ketinggian 70 hingga 130 cm.

"Kondisi genangan sedang ditangani oleh DSDA, Damkar dan PPSU Kelurahan. Genangan ditargetkan akan surut dalam waktu cepat," kata dia. ● **yan**

4 | Metropolis

FOTO: ANT



BOLA VOLI KASAL CUP 2022

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) berfoto bersama usai pertandingan pembuka bola voli Kasal Cup 2022 di GOR Denma Mabasal, Cilangkap, Jakarta, Selasa (7/6). TNI AL menggelar pertandingan bola voli Kasal Cup 2022 pada 7-10 Juni 2022 yang diikuti 16 Tim dengan tujuan untuk mencari bibit atlet.



FOTO: ANT

PENJUALAN TIKET DAIHATSU INDONESIA MASTER 2022

Warga memilih kaos souvenir resmi Daihatsu Indonesia Master 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (7/6). Kepala Bidang Humas dan Media PBSI Broto Happy mengatakan bahwa tiket Daihatsu Indonesia Master 2022 sudah terjual secara daring sebanyak 90 persen, sementara 10 persennya dijual secara langsung.

DPRD DKI Bentuk Pansus IKN, Pengamat: Jangan Hanya Formalitas

JAKARTA (IM) - DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) ibu kota negara (IKN). Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KP-POD, Arman Suparman mengingatkan agar pansus tersebut dapat maksimal dan tidak hanya formalitas.

Arman mengapresiasi inisiatif DPRD DKI untuk membentuk pansus tersebut. Sebab, meskipun revisi UU Kekhususan DKI Jakarta, pansus ini sebagai langkah sistematis, menyiapkan masukan agar lebih terkonsolidasi, lebih sistematis sehingga usulan-usulan dari masyarakat bisa disalurkan melalui pansus," jelasnya.

"Pansus IKN harus benar-benar bisa menjangkau pendapat bahkan kajian yang berbasis data serta bukti untuk substansi proses revisi," tuturnya.

Di sisi lain, pansus IKN juga diharapkan harus bersifat partisipatif artinya menjangkau masukan dari semua kalangan. Jakarta ke depan akan menjadi kota yang khusus menjadi pusat ekonomi.

"Ekonomi Jakarta bergerak pada bidang perdagangan dan jasa. Maka dua poin utama tersebut harus sangat dipertimbangkan dalam nantinya pansus berjalan," tukasnya. ● **yan**

sus IKN juga merupakan langkah yang sistematis agar Pemda DKI dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah pusat terkait revisi UU Kekhususan DKI Jakarta.

"Kami lihat itu sebagai langkah sistematis, menyiapkan masukan agar lebih terkonsolidasi, lebih sistematis sehingga usulan-usulan dari masyarakat bisa disalurkan melalui pansus," jelasnya.

"Pansus IKN harus benar-benar bisa menjangkau pendapat bahkan kajian yang berbasis data serta bukti untuk substansi proses revisi," tuturnya.

Di sisi lain, pansus IKN juga diharapkan harus bersifat partisipatif artinya menjangkau masukan dari semua kalangan. Jakarta ke depan akan menjadi kota yang khusus menjadi pusat ekonomi.

"Ekonomi Jakarta bergerak pada bidang perdagangan dan jasa. Maka dua poin utama tersebut harus sangat dipertimbangkan dalam nantinya pansus berjalan," tukasnya. ● **yan**

Rumah Mewah di Depok Disewa Rp5 Juta per Malam untuk Pesta Dugem

DEPOK (IM) - Rumah mewah di Kota Depok disewa Rp5 juta per malam untuk pesta dugem. Ketika pesta masih berlangsung, polisi langsung menggerebek anak-anak muda. Kemudian, polisi melakukan pendataan dan tes urine.

"Yang jelas ada miras," kata Tiar, penjaga rumah yang dijadikan pesta dugem, Selasa (7/6).

Dia menjelaskan bagaimana rumah mewah yang berdiri di lahan seluas 1.800 meter persegi itu bisa sampai disewa untuk pesta dugem.

Awalnya Tiar didatangi penyewa yang mengaku mahasiswa untuk acara kampus. "Harganya Rp5 juta semalam," ujarnya.

"Saya ketipu sama mereka. Mulanya bilang dari kampus maknanya harga juga untuk mahasiswa/pelajar. Ternyata acara kayak gitu," sambung Tiar.

Meski mengaku kecolongan, namun dia menyangkal adanya pesta bikini.

"Tapi, yang datang memang pakai baju seksi, celana pendek bukan bikini," ka-

tanya.

Dalam pesta yang digelar Sabtu (4/6) malam itu tidak ada artis yang hadir karena dia tidak hapal satu per satu orang yang datang. Dia sempat menegur pihak penyewa karena tidak sesuai dengan izin awal. Namun, malam makin larut semakin banyak yang datang akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebelum acara pun dia sudah merasa ada kejangalan.

"Kayak tergesa-gesa gitu. Ngomongnya acara jam 8 malam tapi jam 5 sore belum ada persiapan," ujar Tiar. Pesta digelar di lantai satu. Sedangkan kamar juga hanya dipakai yang ada di lantai satu.

Diketahui, luas bangunan sekitar 800 meter persegi. Rumah tersebut bernuansa cat putih dan abu-abu. Rumah itu terdiri dari dua lantai dan dilengkapi lift. Ada beberapa kamar di rumah tersebut dan dapat menampung sekitar 100 orang.

"Kemarin hampir 400 orang yang datang, sedangkan kapasitas hanya 100 orang," ucapnya. ● **yan**

Formula E Selesai, PDIP Lanjutkan Wacana Interpelasi

Pemprov DKI diharapkan bisa menjelaskan keterbukaan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik internasional itu.

Tujuannya, agar tidak menimbulkan praduga yang bermacam-macam. "Supaya terang-benderang pengelolaan APBD di ajang itu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

JAKARTA (IM) - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, Formula E memang telah rampung dilaksanakan 4 Juni 2022 lalu.

Namun demikian, kata dia, interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan terkait Formula E akan tetap berlanjut.

"Interpelasi bukan ber-

henti karena Formula E sudah terlaksana," kata Gembong di Jakarta, Selasa (7/6).

Dia menambahkan, pihaknya saat ini masih mendorong pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk kembali menjadwalkan rapat badan musyawarah (Bamus) yang sempat tertunda. Setelahnya, dia berharap, bisa langsung melaksanakan rapat paripurna yang sempat tak memenuhi kuota minimum anggota hadir (kuorum).

"Saat ini kami (masih) mendorong pimpinan untuk segera menjadwalkan rapat bamus," jelasnya.

Ditanya soal gelaran Formula E, Gembong berang-

gapan, Pemprov DKI hanya mengejar kelancaran gelaran Formula E. Tetapi, katanya, mengabaikan keterbukaan transparansi pengelolaan APBD yang digunakan senilai Rp 560 miliar.

Dia berharap, Pemprov DKI bisa menjelaskan keterbukaan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik internasional itu. Tujuannya, agar tidak menimbulkan praduga yang bermacam-macam. "Supaya terang-benderang pengelolaan APBD di ajang itu," katanya.

Dia menyebut, dukungan sudah pasti diberikan Fraksi PDIP terkait ajang terse-

but sebelumnya. Namun, Gembong menegaskan, kebutuhan keterbukaan informasi penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran dari Pemprov DKI.

"Kami mendukung dengan syarat ada keterbukaan pengelolaan keuangan melalui interpelasi," katanya.

Meskipun mendukung, pihaknya tetap mengkritik konstruksi atap tribun sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, yang ambruk. Dia mengatakan, hal itu karena persiapan yang tidak matang dari pihak penyelenggara. "Niati begitu tinggi, tapi tidak disikapi dengan matang," ujarnya. ● **yan**

BPK: Pemprov DKI Kelebihan Bayar Subsidi LRT Rp5,57 Miliar

JAKARTA (IM) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) tahun 2019. Total temuan ini mencapai Rp 5,57 miliar.

Temuan itu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II 2021. BPK menuturkan kelebihan bayar dilakukan Pemprov DKI kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan PT LRT Jakarta (LRTJ).

"Terdapat kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan LRT tahun 2019 dari Pemprov DKI kepada PT JakPro dan PT LRTJ sebesar Rp 5,57 miliar," demikian tulis BPK dalam laporannya, Selasa (7/6).

Selain kelebihan bayar subsidi, BPK menyoroit dua temuan lainnya. Pertama, kekurangan spare part dan tools pada kontrak pengadaan Light Rail Vehicle (LRV) seni-

lai USD 65.220. Serta pemborosan karena adanya spare part yang disertakan dalam kontrak meskipun tidak diperlukan. Nilai pemborosan mencapai USD 4.780.

"Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMD terkait agar melakukan rekonsiliasi atas kelebihan pembayaran subsidi tahun 2019," demikian bunyi rekomendasi BPK.

PT JakPro buka suara terkait kelebihan terima subsidi LRT sebesar Rp 5,57 miliar. Sebagai informasi, PT LRTJ merupakan anak perusahaan JakPro.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT JakPro, Nadia Diposantoyo mengatakan JakPro telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelebihan penerimaan subsidi. Dia mengatakan JakPro siap mengembalikan kelebihan

terima subsidi itu.

"PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (PT JakPro) telah bersurat kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021 perihal Pengakuan Selisih Lebih Bayar Subsidi LRT Jakarta Tahun Anggaran 2019. Selain itu, PT JakPro juga berkomitmen untuk siap mengembalikan selisih lebih bayar tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Nadia dalam keterangannya.

JakPro juga telah bersurat kepada BPKD DKI Jakarta pada 9 Februari 2022. Melalui surat itu, JakPro hendak meminta arahan BPKD DKI terkait selisih lebih bayar subsidi LRT.

"Dari hasil koordinasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menjawab surat PT JakPro setelah terbitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Buku 2021 (audited)," jelasnya. ● **yan**

Pemprov DKI akan Bebaskan Lahan Bangun LRT Kelapa Gading ke JIS

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membebaskan lahan di jalur Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS), Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Pembebasan lahan untuk pembangunan LRT koridor itu seluas 111.812,04 meter persegi (m2).

Informasi yang dikumpulkan di Jakarta, Selasa (7/6), menyatakan, lahan itu terletak di tujuh kelurahan dan dua kecamatan di Jakut dengan luas bervariasi, sebagai berikut:

1. Luas Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, yang dibebaskan lahannya sebesar 771,59 m2.
2. Luas Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, yang dibebaskan lahannya 7.753,67 m2.
3. Luas Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, yang dibebaskan lahannya 6.542,12 m2.
4. Luas Kelurahan Sungai

Bambu, Tanjung Priok, yang dibebaskan lahannya sebesar 18.633,59 m2.

5. Luas Kelurahan Panggo, Tanjung Priok, yang dibebaskan lahannya sebesar 9.815,34 m2.

6. Luas Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, yang dibebaskan lahannya sebesar 300,5 m2.

7. Luas Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, yang dibebaskan lahannya sebesar 67.995,68 m2.

Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pendanaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah akan dilaksanakan sampai tahun 2023 sesuai waktu maksimal ketentuan penempatan lokasi. Adapun pelaksanaan pembangunan direncanakan akan dimulai pada 2023.

Diharapkan jalur LRT Jakarta Fase 2A Koridor Kelapa Gading-JIS dapat beroperasi pada 2025. Belum ada data pasti, berapa anggaran yang disiapkan untuk rencana pembebasan lahan itu. ● **yan**

50 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi Terima Bantuan Presiden

SERANG BARU (IM) - Sebanyak 50 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan Banpres atau Bantuan Presiden yang disalurkan melalui Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JKPP). Bantuan diserahkan di Aula Kecamatan Serang Baru, Senin (6/6).

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengapresiasi JKPP atas kepedulian dan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya Serang Baru, sehingga dapat meringankan beban saudara penyandang disabilitas. Selain itu juga, JKPP juga menyediakan fasilitas pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Saya mengucapkan apresiasi kepada penyelenggara, atas kepeduliannya, perhatiannya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi terutama bagi penyandang disabilitas di sini. Kita juga bisa melaksanakan pendaftaran DTKS yang difasilitasi oleh JKPP," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi Senin (6/6) malam.

Dani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya menynergikan semua



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kiri) saat memberikan Bantuan Presiden ke salah satu penyandang disabilitas secara simbolis di Aula Kecamatan Serang Baru, Senin (6/6).

pihak terkait guna kesejahteraan para penyandang disabilitas.

"Secara bertahap yang akan kami lakukan, yakni program dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Dinas Provinsi dan dinas lainnya untuk membantu

makan gratis" khusus untuk penyandang disabilitas dan jompo terlantar. Dirinya mengatakan, hal ini merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, sehingga mampu bersama-sama membangun solidaritas dan kesejahteraan manusia.

"Untuk program pertama kita, bagi kaum disabilitas, jompo terlantar dan lainnya kami akan membuka warung makan gratis. Jika bapak dan ibu tidak bisa ke warung tersebut, nanti rantangannya akan diantar kerumah masing-masing setiap jam makan siang. Kami juga membuka untuk para donatur, yayasan untuk ikut membantu dan mendukung program ini," katanya.

Dengan dijadikannya Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VI Jawa Barat pada November mendatang, Pj. Bupati berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan martabat penyandang disabilitas, dan diharapkan mampu menunjukkan prestasi olahraga yang luar biasa.

"Nanti bulan November ada Peparda Jawa Barat, untuk meningkatkan martabat

dan tentu para disabilitas ini mampu menunjukkan peraih prestasi yang luar biasa dan membanggakan," pungkasnya.

Selain paket sembako Banpres, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi juga ikut menyalurkan bantuan sebanyak 50 paket sembako kepada para penyandang disabilitas. ● **mdl**

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bersama ini diumumkan bahwa terdapat peningkatan modal dasar dan modal setor serta perubahan pengendalian saham PT Perintis Niaga Indonesia ("Perseroan") yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham mayoritas/pengendalian.

Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kreditor, terkait dengan hutang piutang, hak/kewajiban, hubungan hukum dan lain-lain, yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan saham tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan disertai bukti-bukti pendukung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini.

PT PERINTIS NIAGA INDONESIA
GAMA TOWER Lantai 41
Jl. HR Rasuna Said Kav C22,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan.
DKI Jakarta - Indonesia
Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi
PT PERINTIS NIAGA INDONESIA